

## **Analisis Faktor-Faktor Kemiskinan di Kabupaten/Kota Daerah Istimewa Yogyakarta**

Ayu Salsabilla<sup>1</sup>, Indri Arrafi Juliannisa<sup>2</sup>, Nunuk Triwahyuningtyas<sup>3</sup>  
<sup>1,2,3</sup> Universitas Pembangunan Nasional Veteran, Jakarta.

Jl. Rs. Fatmawati, Pondok Labu, Jakarta Selatan, DKI Jakarta, 12450, Indonesia

E-mail : ayu.salsabilla@upnvj.ac.id<sup>1</sup>, indri.arrafi@upnvj.ac.id<sup>2</sup>,  
nunuktrihayuningtyas@upnvj.co.id<sup>3</sup>

### **ABSTRAK**

Permasalahan kemiskinan di 5 Kabupaten/Kota Daerah Istimewa Yogyakarta jika diukur dengan persentase penduduk miskin (*Head Count Index*) sudah mengalami penurunan namun cenderung lambat dalam tahun 2014-2019 dan permasalahan ini menjadi tantangan pemerintah karena masih tingginya tingkat kemiskinan pada peringkat pertama di Pulau Jawa dan di atas angka kemiskinan nasional. Hal ini terjadi karena jumlah penduduk yang mengalami peningkatan tiap tahunnya akan berdampak pada pengurangan jumlah tabungan rumah tangga, peningkatan IPM yang cenderung sangat lambat dan masih terdapat daerah yang tertinggal di bawah rata-rata nasional, upah minimum yang relatif rendah sehingga masyarakat kesulitan untuk memenuhi kebutuhan hidup layaknya dan jumlah penyerapan tenaga kerja di DIY bergerak sangat lambat karena masih terbatasnya jumlah lapangan kerja di DIY. Penelitian ini menggunakan teknik analisis regresi data panel dengan data yang digunakan adalah data sekunder yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik. Hasil penelitian yang diperoleh menunjukkan bahwa jumlah penduduk, upah minimum, penyerapan tenaga kerja berpengaruh sedangkan IPM tidak berpengaruh terhadap kemiskinan. Saran untuk peneliti selanjutnya yaitu menambah variabel-variabel lain yang mempengaruhi kemiskinan sehingga menghasilkan penelitian yang lebih bermanfaat serta perbedaan hasil *variable* bebas yang digunakan harus dibuktikan lebih lanjut secara teori.

**Kata kunci : Kemiskinan, Jumlah Penduduk, Indeks Pembangunan Manusia, Upah Minimum, Penyerapan Tenaga Kerja**

### **ABSTRACT**

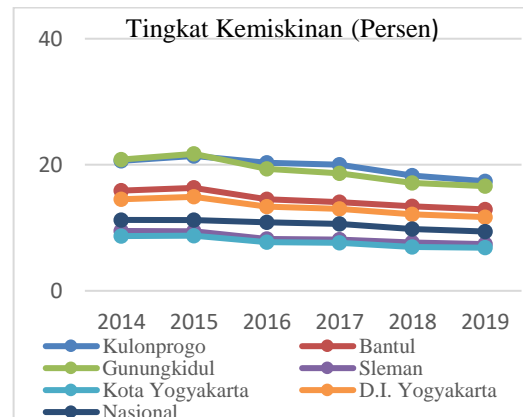
*The problem of poverty in 5 Regencies/Cities of the Special Region of Yogyakarta when measured by the percentage of poor people (Head Count Index) has decreased but tends to be slow in 2014-2019 and this problem is a challenge for the government because the poverty rate is still high in the first rank in Java and above the national poverty rate. This happens because the number of people who experience an increase every year will have an impact on reducing the number of household savings, the increase in HDI tends to be very slow and there are still areas that are lagging behind the national average, the minimum wage is relatively low so that people find it difficult to meet their needs. live a normal life and the number of employment in DIY is moving very slowly because of the limited number of jobs in DIY. This study uses panel data regression analysis technique with the data used is secondary data obtained from the Central Statistics Agency. The results obtained indicate that the population, minimum wage, employment have an effect while HDI has no effect on poverty. Suggestions for further researchers are to add other variables that affect poverty so as to produce more useful research and the difference in the results of the independent variables used must be further proven in theory.*

**Keyword : Poverty, Population, Human Development Index, Minimum Wage, Employment**

## 1. PENDAHULUAN

Kemiskinan adalah masalah nasional yang terjadi di seluruh wilayah di Indonesia sebagai mana yang diungkapkan dalam teori kemiskinan dalam buku yang dikarang oleh Nurkse tahun 1953, yang mengemukakan bahwa kemiskinan yang tinggi terjadi karena jumlah penduduk yang semakin banyak sehingga menyebabkan turunnya investasi masyarakat baik pada pendidikan dan kesehatan yang dapat menghambat peningkatan Indeks Pembangunan Manusia. Rendahnya kualitas hidup menyebabkan produktivitas rendah dan kemiskinan tinggi. Produktivitas yang rendah akan menyebabkan pendapatan yang diterima di bawah minimum sehingga masyarakat miskin tidak bisa memenuhi kebutuhan pokoknya. Rendahnya pendapatan dapat dipicu oleh rendahnya upah yang diterima oleh tenaga kerja selain itu proses penciptaan lapangan pekerjaan dan penyerapan tenaga kerja yang minim di Indonesia menyebabkan penduduk tidak dapat memenuhi kebutuhannya sehari hari sehingga kemiskinan menjadi tinggi.

Masalah nasional yang dihadapi oleh Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) adalah masih tingginya tingkat kemiskinan. Tingkat kemiskinan di DIY bila dibandingkan dengan lima provinsi lainnya di Pulau Jawa masih tergolong paling tinggi, hal ini terjadi karena sumber daya dan lapangan kerja yang dimiliki terbatas, dengan adanya fenomena ini peneliti memilih daerah di Kabupaten/Kota DIY sebagai lokasi penelitian. Menurut BPS (2020), pada tahun 2019 Provinsi DIY memiliki tingkat kemiskinan nomor 1 di Pulau Jawa dan urutan ke 12 dari seluruh provinsi di Indonesia.



Sumber: Badan Pusat Statistik, 2020.

Grafik 1. Tingkat Kemiskinan Kabupaten / Kota DIY dan Nasional Tahun 2014-2019 (Persen)

Dapat dilihat di grafik 1, kemiskinan Provinsi DIY di tahun 2014 sebesar 14.55% dan meningkat pada tahun 2015 menjadi 14.91%. Hal ini disebabkan oleh data penerima bantuan yang tidak akurat sehingga bantuan dari pemerintah untuk menyediakan jamsos belum tepat sasaran sehingga menyebabkan angka penurunan kemiskinan itu lambat (Luckynuari, 2019). Angka kemiskinan Provinsi DIY masih lebih tinggi dari angka nasional hal ini dapat dilihat pada tahun 2019, kemiskinan di DIY tercatat 11,7% atau lebih tinggi 2,29% dari tingkat kemiskinan nasional. Fenomena yang melatarbelakangi penelitian ini yaitu kemiskinan yang lebih tinggi dari kemiskinan nasional sehingga masalah kemiskinan ini harus diteliti lebih lanjut agar penduduk di DIY tidak terperangkap dalam lingkaran kemiskinan.

Jumlah penduduk adalah permasalahan mendasar bagi kemiskinan dikarenakan pertumbuhan penduduk yang tidak teratur bisa menyebabkan kesejahteraan rakyatnya tidak tercapai sehingga ada pengaruh antara penambahan jumlah penduduk terhadap kemiskinan (Didu & Fauzi, 2016).

Kualitas sumber daya manusia adalah faktor penyebab terjadinya kemiskinan, hal ini dapat dilihat dari indeks

pembangunan manusia yang terdiri dari tiga dimensi yaitu kesehatan, pendidikan dan daya beli, ini merupakan indikator pembangunan yang berkorelasi negatif dengan kondisi kemiskinan di daerah tersebut, oleh karena itu semakin tinggi nilai IPM di suatu daerah, maka idealnya kualitas hidup masyarakat akan semakin baik dan angka kemiskinan juga rendah (Fahrika dkk, 2020).

Menurut Agustina (2019), faktor lain yang mempengaruhi kemiskinan adalah upah karena pendapatan penduduk mencapai maksimal apabila keadaan tingkat penggunaan tenaga kerja penuh bisa tercipta melalui adanya upah minimum yang diharapkan dapat mendorong peningkatan produktivitas kerja. Berbagai solusi yang dilakukan pemerintah DIY dalam mengatasi kemiskinan yaitu melalui peningkatan pendapatan sehingga terlihat terjadi peningkatan yang signifikan pada upah minimum DIY.

Menurut Purnomo & Kusreni (2019), permasalahan lain yang dapat menyebabkan kemiskinan diungkapkan dalam penelitian ini merupakan angkatan kerja yang tinggi namun lapangan pekerjaan yang tersedia sangat terbatas sehingga penyerapan tenaga kerja memiliki pengaruh terhadap kemiskinan, karena tingginya jumlah penyerapan tenaga kerja sebagai modal untuk pembangunan daerah sehingga dapat mengurangi tingkat kemiskinan dan apabila tenaga kerja yang terserap tidak diimbangi dengan penurunan tingkat kemiskinan maka kualitas lapangan pekerjaan yang ada perlu diperbaiki dengan pemberian jamsos. Jumlah penduduk yang bekerja di DIY sangat lambat disebabkan perusahaan di DIY tidak memiliki kemampuan tinggi dalam menyerap tenaga kerja. Berbeda jika dibandingkan dengan Semarang atau Jakarta yang merupakan kota-kota besar dan tergolong daerah kawasan industri sehingga peningkatan jumlah tenaga kerja akan mendorong peningkatan

produktivitas dan menyebabkan angka pengangguran menurun karena faktor ini berbanding lurus dengan jumlah kemiskinan yang menurun tapi masih diatas rata-rata nasional (Sabandar, 2016). Dari uraian yang telah dijelaskan di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

- a. Bagaimana pengaruh jumlah penduduk terhadap kemiskinan di Kabupaten/Kota Daerah Istimewa Yogyakarta?
- b. Bagaimana pengaruh indeks pembangunan manusia terhadap kemiskinan di Kabupaten/Kota Daerah Istimewa Yogyakarta?
- c. Bagaimana pengaruh upah minimum terhadap kemiskinan di Kabupaten/Kota Daerah Istimewa Yogyakarta?
- d. Bagaimana pengaruh penyerapan tenaga kerja terhadap kemiskinan di Kabupaten/Kota Daerah Istimewa Yogyakarta?

Dari rumusan masalah yang telah di jelaskan sebelumnya, maka tujuan masalah yang dapat diperoleh adalah untuk mengetahui pengaruh jumlah penduduk, indeks pembangunan manusia, upah minimum, penyerapan tenaga kerja terhadap kemiskinan di Kabupaten/Kota Daerah Istimewa Yogyakarta.

## 2. METODOLOGI

Penelitian ini sampelnya menggunakan teknik *non probability sampling*. Menurut Sugiyono (2017), *non probability sampling* merupakan teknik pengambilan sampel yang tidak memberikan kesempatan yang sama bagi setiap anggota populasi untuk dijadikan sampel. Teknik pengambilan sampel yang digunakan yaitu sampel jenuh di mana semua anggota populasi digunakan menjadi sampel. Sampel penelitian diambil sebanyak 30 sampel yang didapat dari banyaknya daerah penelitian yang diambil yaitu 5 Kabupaten/Kota DIY dikali dengan periode tahun 2014-2019

yaitu sebanyak 6 tahun. Pada penelitian ini jenis pengumpulan data dan informasi yang dipakai menggunakan data sekunder yang didapat secara tidak langsung dan dipublikasikan oleh pihak lain untuk dijadikan objek penelitian yaitu berasal dari badan pusat statistik. Data di dalam penelitian ini bersifat kuantitatif dan peneliti melakukan pengumpulan data menggunakan cara dokumentasi dan studi pustaka. Penelitian ini menggunakan teknik analisis regresi data panel dan data diolah menggunakan program *Eviews 10*. Data panel pada penelitian ini adalah penggabungan data *time series* dengan data *cross section*.

Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah menggunakan logaritma berganda. Hasil regresi akan diubah dalam bentuk logaritma berganda dengan menggunakan logaritma natural (LN). Variabel-variabel yang memiliki satuan juta rupiah seperti, upah minimum dan satuan jiwa yaitu jumlah penduduk dan penyerapan tenaga kerja perlu ditransformasikan ke dalam bentuk satuan persen (%) (Benny, 2013). Persamaan diatas diubah ke dalam bentuk logaritma natural sehingga menjadi:

$$Y_{it} = \beta_0 + \beta_1 \ln X_{1it} + \beta_2 X_{2it} + \beta_3 \ln X_{3it} + \beta_4 \ln X_{4it} + \varepsilon_{it} \quad (1)$$

Keterangan:

$Y_{it}$  = Kemiskinan pada daerah  $i$  dan tahun  $t$ ,  $\ln X_{1it}$  = Log natural Jumlah Penduduk pada daerah  $i$  dan tahun  $t$ ,  $X_{2it}$  = Indeks Pembangunan Manusia pada daerah  $i$  dan tahun  $t$ ,  $\ln X_{3it}$  = Log natural Upah Minimum pada daerah  $i$  dan tahun  $t$ ,  $\ln X_{4it}$  = Log natural Penyerapan Tenaga Kerja pada daerah  $i$  dan tahun  $t$ ,  $i$  = Daerah (Kabupaten/Kota Provinsi DIY),  $t$  = Waktu (2014 hingga 2019),  $\beta_0$  = Konstanta,  $\beta_1, \beta_2, \beta_3, \beta_4$  = Koefisien,  $\varepsilon_{it}$  = Variabel Pengganggu

Langkah awal pengolahan data adalah melakukan uji asumsi klasik yang bertujuan untuk memastikan bahwa hasil penelitian adalah valid dengan data yang

digunakan secara teori adalah tidak bias, konsisten dan penaksiran koefisien regresinya efisien (Gujarati & Porter, 2013). Uji asumsi klasik yang digunakan yaitu normalitas, multikolinieritas, autokorelasi, heteroskedastisitas. Langkah selanjutnya adalah melakukan estimasi model regresi data panel dengan menggunakan *common effect model*, *random effect model*, *fixed effect model*. Pemilihan kesesuaian model yang terbaik dan akan digunakan untuk melakukan analisis yaitu dengan 2 cara, pertama menggunakan uji chow dengan cara memilih antara *common effect model* atau *fixed effect model*, kedua uji *hausman* untuk memilih antara *fixed effect model* dengan *random effect model*. Langkah terakhir yaitu uji signifikansi yang digunakan untuk mengetahui tingkat signifikan dari masing-masing koefisien regresi variabel *independent* terhadap variabel *dependent* yang terdiri atas uji T, uji F, uji *Rsquared* dan *adjusted Rsquared*.

### 3. LANDASAN TEORI

#### Teori Kemiskinan

Ragnar Nurkse (1952), terkenal dengan teorinya mengenai lingkaran kemiskinan yang dituangkan dalam bukunya dengan judul *Some Aspects of Capital Accumulation in Underdeveloped Countries* yang diterbitkan pada tahun 1952 yang menyebut adanya sebuah lingkaran kemiskinan (*vicious circle*). Nurkse mengemukakan bahwa adanya ketertinggalan SDM yang tecermin oleh IPM yang rendah, ketidaksempurnaan pasar dan kurangnya modal mengakibatkan produktivitas yang rendah. Produktivitas yang rendah menyebabkan penurunan pendapatan yang diterima yang tecermin dari rendahnya upah yang didapatkan di bawah minimum. Rendahnya upah akan berkaitan dengan rendahnya konsumsi, tabungan dan investasi, rendahnya investasi berakibat pada rendahnya

akumulasi modal sehingga proses penciptaan lapangan pekerjaan rendah tecermin oleh rendahnya penyerapan tenaga kerja. Rendahnya akumulasi modal disebabkan oleh keterbelakangan dan seterusnya (Kuncoro, 1997).

### **Teori Jumlah Penduduk**

Teori penduduk oleh Malthus yang menggambarkan populasi suatu negara merupakan masalah yang serius, menurutnya populasi penduduk apabila tidak dicegah maka akan berlipat ganda setiap 30 atau 40 tahun dan pada waktu yang bersamaan persediaan sumber daya alam, lahan dan faktor-faktor produksi lainnya mulai berkurang sehingga terjadilah kelangkaan sumber daya dengan berkurangnya kelangkaan sumber daya maka pendapatan per kapita menjadi rendah atau biasa disebut dengan kemiskinan absolut. (Todaro & Smith, 2011).

### **Teori Indeks Pembangunan Manusia**

Salah satu faktor yang mempengaruhi kemiskinan yaitu pendidikan. Variabel IPM terdiri atas tiga komponen yaitu kesehatan (angka harapan hidup), pendidikan (gabungan angka melek huruf dan rata-rata lama sekolah) dan standar hidup yang layak (kemampuan daya beli dilihat dari rata-rata besarnya pengeluaran perkapita) serta kita harus merujuk pada *united nations development programme* yang membuat dan menyempurnakan tentang Indeks Pembangunan Manusia (*Human Development Index*) yang mengungkapkan bahwa IPM adalah indikator yang mengukur capaian pembangunan sosial dan ekonomi suatu negara yang menggabungkan pencapaian di bidang pendidikan, kesehatan dan pendapatan riil per kapita yang disesuaikan (Todaro & Smith, 2011).

### **Teori Upah Minimum**

Usaha untuk mengangkat derajat masyarakat yang memiliki pendapatan

rendah, terutama pekerja miskin merupakan tujuan upah minimum. Menurut Nurkse, upah yang rendah di bawah minimum akan mempengaruhi tabungan jika tidak ada tabungan maka akan menyulitkan masyarakat miskin untuk memenuhi kebutuhan pokoknya bahkan ada yang tidak mencukupi untuk biaya hidup sehingga menimbulkan kemiskinan. Seseorang yang memperoleh penghasilan di bawah *poverty line* digolongkan dalam kemiskinan absolut sehingga konsep ini bertujuan untuk menentukan tingkat pendapatan minimum yang cukup untuk memenuhi kebutuhan pangan, sandang, papan agar dapat menjamin kelangsungan hidup.

### **Teori Penyerapan Tenaga Kerja**

Nurkse juga menyampaikan masalah rendahnya investasi menyebabkan akumulasi modal yang rendah sehingga proses tersedianya lapangan pekerjaan menjadi rendah dan rendahnya lapangan pekerjaan akan mengakibatkan penyerapan tenaga kerja dalam lapangan kerja menjadi sedikit atau banyak masyarakat yang menganggur sehingga kemiskinan menjadi meningkat. Penyerapan tenaga kerja disini yaitu sebuah situasi yang menggambarkan ketersediaan lapangan pekerjaan untuk diisi oleh pencari kerja. Tenaga kerja yang terserap adalah terisinya jumlah lapangan kerja, yang tecermin dari tingginya pertumbuhan penduduk yang bekerja. Penyerapan penduduk yang bekerja disebabkan oleh adanya permintaan akan tenaga kerja, sehingga penyerapan tenaga kerja dapat dikatakan sebagai permintaan tenaga kerja (Todaro, 2004).

## **4. HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Uji Asumsi Klasik**

Berdasarkan hasil uji normalitas, nilai hitung dari nilai probabilitas Jarque-Bera adalah  $0.625981 > 0,05$ , sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa *residual*

terdistribusi normal yang berarti asumsi klasik tentang normalitas sudah terpenuhi atau tidak terdapat masalah normalitas.

Berdasarkan hasil uji output matrik korelasi dapat terlihat korelasi antara LN\_JP dan LN\_PTK sebesar 0.99. Hal ini dapat menunjukkan pada model regresi di atas terdapat masalah multikolinearitas.

Berdasarkan hasil uji autokorelasi yang telah dilakukan menunjukkan bahwa nilai DW adalah 1.964011, untuk melihat ada tidaknya masalah autokorelasi dilihat dengan cara membandingkan nilai DW dengan tabel DW. Dalam penelitian ini  $n = 30$ ,  $k = 5$ ,  $dL = 1.14262$  dan  $dU = 1.73860$ . Karena nilai  $du (1.73860) < d (1.964011) < 4-du (2,035989)$  sehingga dapat di tarik kesimpulan bahwa tidak terjadi masalah autokorelasi.

Uji heteroskedastisitas ini memakai metode uji *glejser*. Jika nilai probabilitas  $< 0.05$  maka terjadi heteroskedastisitas dan begitu pula sebaliknya. Nilai probabilitas dari variabel independen memiliki nilai  $> 0.05$ , sehingga dapat dikatakan terbebas dari masalah heteroskedastisitas

### Teknik Penentuan Model

Berdasarkan pada hasil uji hausman, diperoleh nilai distribusi *chi-square* yaitu sebesar 12.463735 dengan probabilitas *chi-square* 0.0142 dimana lebih kecil dari *alpha* 0.05 ( $0.0142 < 0.05$ ) maka menolak  $H_0$ . Artinya, dalam penelitian ini metode estimasi terbaik yang digunakan merupakan *fixed effect model*. Berdasarkan hasil uji chow dan uji hausman yang telah dilakukan, *Fixed Effect Model* (FEM) telah dipilih 2 kali, yakni pada chow *test* dan hausman *test* sedangkan *common effect model* dan *random effect model* pada pengujian ini tidak terpilih sama sekali.

### Uji T

Berdasarkan hasil regresi jumlah penduduk memiliki  $t_{hitung} (2.720164) >$

$t_{tabel} (2.06)$ . Nilai probabilitas variabel jumlah penduduk sebesar 0.0128 lebih kecil dari  $\alpha=5\%$  ( $0.0128 < 0.05$ ), sehingga secara statistik variabel jumlah penduduk (LN\_JP) berpengaruh signifikan terhadap variabel kemiskinan, maka dengan ini dapat disimpulkan bahwa  $H_0$  ditolak yang artinya var jumlah penduduk memiliki pengaruh terhadap ( var terikat ), oleh sebab itu Hipotesis 1 dinyatakan diterima.

Berdasarkan hasil regresi, IPM memiliki  $t_{hitung} (-0.182866) < t_{tabel} (2.06)$ . Nilai probabilitas variabel IPM sebesar 0.7016 lebih besar dari  $\alpha=5\%$  ( $0.7016 > 0.05$ ), sehingga secara statistik variabel indeks pembangunan manusia (IPM) tidak berpengaruh dan tidak signifikan terhadap variabel kemiskinan, maka dengan ini dapat disimpulkan bahwa  $H_0$  diterima yang artinya var IPM tidak memiliki pengaruh terhadap ( var terikat ), oleh sebab itu Hipotesis 2 dinyatakan ditolak.

Berdasarkan hasil regresi, upah minimum memiliki  $t_{hitung} (-3.611852) > t_{tabel} (2.06)$ . Nilai probabilitas variabel upah minimum sebesar 0.0016 lebih kecil dari  $\alpha=5\%$  ( $0.0016 < 0.05$ ), sehingga secara statistik variabel upah minimum (LN\_UM) berpengaruh signifikan terhadap variabel kemiskinan, maka dengan ini dapat disimpulkan bahwa  $H_0$  ditolak yang artinya var upah minimum memiliki pengaruh terhadap ( var terikat ), oleh sebab itu Hipotesis 3 dinyatakan diterima.

Berdasarkan hasil regresi, penyerapan tenaga kerja memiliki  $t_{hitung} (-2.362295) > t_{tabel} (2.06)$ . Nilai probabilitas variabel penyerapan tenaga kerja sebesar 0.0279 lebih kecil dari  $\alpha=5\%$  ( $0.0279 < 0.05$ ), sehingga secara statistik variabel penyerapan tenaga kerja (LN\_PTK) berpengaruh signifikan terhadap variabel kemiskinan, maka dengan ini dapat disimpulkan bahwa  $H_0$  ditolak yang artinya var penyerapan tenaga kerja memiliki pengaruh terhadap

( var terikat ), oleh sebab itu Hipotesis 4 dinyatakan diterima.

#### Uji F

Nilai  $F_{hitung}$  diperoleh sebesar 347.0564 sedangkan  $F_{tabel}$  sebesar 2.76, sehingga diperoleh hasil  $F_{hitung}$  (347.0564) >  $F_{tabel}$  (2.76) dan probabilitas sebesar  $0.000000 < \alpha = 5\%$  sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa variabel *independent* jumlah penduduk, IPM, upah minimum, penyerapan tenaga kerja secara bersama-sama signifikan mempengaruhi variabel *dependent* dalam hal ini kemiskinan (Y).

#### Koefisien determinasi *Rsquared* dan *adjusted rsquared*

Nilai  $R^2$  sebesar 0.992493 artinya adalah variabel kemiskinan dapat dijelaskan oleh variabel jumlah penduduk, IPM, upah minimum dan penyerapan tenaga kerja sebesar 99.25% dan sisanya yaitu sebesar 0.75% dapat dijelaskan oleh variabel di luar model penelitian ini. Serta nilai *adjusted R<sup>2</sup>* sebesar 0.989633 yang artinya variabel terikat kemiskinan dipengaruhi oleh variabel bebas jumlah penduduk, IPM, upah minimum dan penyerapan tenaga kerja sebesar 98,96% dan sisanya sebesar 1,04% dipengaruhi oleh variabel-variabel lain yang tidak digunakan dalam penelitian ini.

#### Analisis Pengaruh Variabel Jumlah Penduduk Terhadap Kemiskinan di Kabupaten/Kota Daerah Istimewa Yogyakarta.

Hasil pengujian model *fixed effect* ini membuktikan bahwa  $H_0$  ditolak dan  $H_1$  diterima yang menunjukkan jumlah penduduk mempunyai pengaruh signifikan terhadap kemiskinan di Kabupaten/Kota DIY. Menurut Nurkse (1964), jumlah penduduk bukanlah satu faktor penentu yang asasi karena satu negara yang memiliki jumlah penduduk banyak serta penduduk tersebut berproduktivitas tinggi maka akan

membantu menurunkan permasalahan jumlah kemiskinan. Teori Nurkse ini sesuai dengan keadaan nyata yang dialami oleh daerah DIY dan berlawanan dengan penjelasan teori oleh Malthus yang menggambarkan populasi suatu negara merupakan masalah yang serius, menurutnya populasi penduduk apabila tidak dicegah maka akan berlipat ganda setiap 30 atau 40 tahun dan pada waktu yang bersamaan persediaan sumber daya alam, lahan dan faktor-faktor produksi lainnya mulai berkurang sehingga terjadilah kelangkaan sumber daya yang menyebabkan pendapatan per kapita menjadi rendah atau biasa disebut kemiskinan absolut dengan kata lain jika perkembangan sumber daya tidak dapat mendukung perkembangan jumlah penduduk maka akan menyebabkan kemiskinan sehingga hasil regresi data penelitian ini lebih mendukung kepada teori Malthus dan Todaro namun hasil keadaan nyata mendukung ke teori Nurkse.

Hasil uji ini sejalan dengan penelitian oleh Hutagaol dkk (2019) yang membuktikan bahwa jumlah penduduk memiliki pengaruh positif terhadap kemiskinan di semua provinsi Indonesia sehingga sejalan dengan hasil penelitian ini bahwa jumlah penduduk berhubungan positif tapi dalam keadaan nyatanya hanya terjadi pada tahun 2014-2015, selebihnya kemiskinan perlahan menurun.

#### Analisis Pengaruh Variabel Indeks Pembangunan Manusia Terhadap Kemiskinan di Kabupaten/Kota Daerah Istimewa Yogyakarta.

Hasil pengujian model *fixed effect* ini membuktikan bahwa IPM tidak memiliki pengaruh dan tidak signifikan terhadap kemiskinan di Kabupaten/Kota DIY. Hal ini tidak sejalan dengan hipotesis bahwa IPM berpengaruh terhadap kemiskinan sehingga hipotesis nol ( $H_0$ ) diterima. Hal ini disebabkan oleh tiga indikator yaitu pertama,

pendidikan yang dipengaruhi dengan adanya sektor lapangan pekerjaan yakni pertanian yang mendominasi di Kabupaten/Kota DIY sehingga tidak terlalu membutuhkan tenaga kerja yang memiliki pendidikan tinggi. Kedua, kesehatan yaitu banyaknya penduduk lanjut usia, mereka tidak memiliki kemampuan untuk bekerja lagi sehingga mengakibatkan para lansia hanya mengandalkan pemberian dari orang lain padahal kebutuhan mereka sangat banyak sehingga mereka menjadi miskin. Ketiga, standar hidup layak di DIY masih sangat rendah di kalangan rakyat miskin karena mereka sudah merasa cukup dengan kebutuhan pokoknya saja seperti kebutuhan sandang dan pangan seadanya dan tidak berlebihan.

Arah koefisien dari pengujian ini hasilnya sudah sesuai dengan teori dan konsep IPM akan tetapi karena penelitian ini menunjukkan hasil probabilitas yang tidak signifikan maka hal ini tidak sesuai dengan teori Nurkse yang mengatakan bahwa IPM mempunyai pengaruh untuk menurunkan kemiskinan tetapi variabel ini tetap merupakan variabel yang tidak dapat diabaikan begitu saja karena tingginya IPM akan menyebabkan naiknya produktivitas kerja dan akan meningkatkan penghasilan sehingga masyarakat mampu mencukupi kebutuhannya dan tingkat kemiskinan berkurang (Nurkse, 1964). Hasil penelitian ini didukung penelitian dari Susilowati & Suliswanto (2015) yang menyatakan bahwa tidak ada hubungan antara variabel IPM dengan kemiskinan di Indonesia.

#### **Analisis Pengaruh Variabel Upah Minimum Terhadap Kemiskinan di Kabupaten/Kota Daerah Istimewa Yogyakarta**

Hasil pengujian model *fixed effect* ini membuktikan bahwa  $H_0$  ditolak dan  $H_3$  diterima yang artinya hasil tersebut sejalan dengan hipotesis yang menunjukkan upah minimum mempunyai

pengaruh yang signifikan terhadap kemiskinan di Kabupaten/Kota DIY. Hal ini didukung oleh teori upah oleh Nurkse dan Malthus yaitu jika tenaga kerja diberi upah di bawah upah yang berlaku maka akan mempengaruhi tabungan dan kemakmuran akan berkurang.

Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian Rosalia Lukita Sari dan Rifki Khoirudin (2019), dari hasil estimasi dan pengujian statistik diperoleh hasil bahwa upah minimum kabupaten memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan di Pulau Madura. Upah minimum adalah usaha untuk mengangkat derajat masyarakat yang berpendapatan rendah dan memiliki tujuan untuk mencapai standar hidup minimum serta merupakan indikator yang mempengaruhi pendapatan di masyarakat untuk menjadi tinggi atau rendah. Hal ini sesuai dengan faktanya bahwa upah minimum di DIY yang mengalami peningkatan setiap tahunnya karena kebijakan PemProv (gubernur) agar masyarakat bisa meningkatkan daya beli dan membuat para pekerja lebih termotivasi dalam meningkatkan produktivitas kerjanya.

#### **Analisis Pengaruh Variabel Penyerapan Tenaga Kerja Terhadap Kemiskinan di Kabupaten/Kota Daerah Istimewa Yogyakarta**

Hasil pengujian model *fixed effect* ini membuktikan bahwa  $H_0$  ditolak dan  $H_4$  diterima. Hasil tersebut sesuai dengan hipotesis bahwa penyerapan tenaga kerja mempunyai pengaruh signifikan terhadap kemiskinan di Kabupaten/Kota Daerah Istimewa Yogyakarta. Hal ini sesuai dengan teori penyerapan tenaga kerja oleh Nurkse yaitu rendahnya proses penciptaan lapangan kerja akan menyebabkan tenaga kerja yang terserap dalam lapangan pekerjaan menjadi rendah dan kemiskinan menjadi tinggi.

Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian Ansori, Joko Priyono (2018), yang diperoleh hasil bahwa penyerapan



tenaga kerja memiliki hubungan yang berpengaruh signifikan terhadap jumlah kemiskinan di Provinsi Jawa Timur. Salah satu cara untuk menurunkan kemiskinan yaitu melakukan investasi untuk tenaga kerja agar dapat meningkatkan penyerapan tenaga kerja sehingga dengan begitu masyarakat DIY dapat keluar dari lingkaran kemiskinan. Hal ini sejalan dengan fakta yang terjadi bahwa lapangan usaha di DIY masih didominasi oleh pertanian sehingga perlu dilakukan terobosan baru berupa investasi di bidang teknologi, alat-alat pertanian dan bibit unggul, ketika masa puncak panen tanaman pangan tiba akan mendorong peningkatan penyerapan tenaga kerja di wilayah sekitarnya, selama periode tersebut permintaan pekerja pertanian meningkat, hal ini didukung oleh pernyataan Nurkse bahwa sektor pertanianlah yang menyerap sebagian besar tenaga kerja negara yang miskin (Nurkse, 1964).

## 5. KESIMPULAN

Jumlah penduduk berpengaruh terhadap variabel kemiskinan di Kabupaten/Kota Daerah Istimewa Yogyakarta, hal ini disebabkan karena jumlah pertumbuhan penduduk yang tinggi dimana tingkat kelahiran penduduk masih sangat tinggi. Pemerintah sudah berusaha semaksimal untuk meningkatkan kesejahteraan namun pertumbuhan penduduk melebihi daripada perkiraan pemerintah.

Indeks Pembangunan Manusia tidak berpengaruh terhadap kemiskinan di Kabupaten/Kota Daerah Istimewa Yogyakarta. Hal ini disebabkan karena sektor lapangan kerja yang mendominasi di Kabupaten/Kota Daerah Istimewa Yogyakarta yakni sektor pertanian yang tidak membutuhkan tenaga kerja yang berpendidikan tinggi, banyaknya lansia yang tidak produktif dan standar hidup layak yang rendah sehingga kemiskinan

tidak selalu dipengaruhi oleh tingginya IPM di DIY.

Upah minimum berpengaruh terhadap kemiskinan di Kabupaten/Kota Daerah Istimewa Yogyakarta. Hal ini dapat disimpulkan bahwa semakin tinggi upah minimum maka kemiskinan di Kabupaten/Kota DIY akan menurun. Penetapan kebijakan upah minimum ini bertujuan untuk memberikan penghasilan yang layak bagi pekerja agar produktivitas pekerja meningkat sehingga akan meningkatkan kesejahteraan serta melindungi pekerja agar tidak terjatuh dalam lingkaran kemiskinan.

Penyerapan tenaga kerja berpengaruh terhadap kemiskinan di Kabupaten/Kota Daerah Istimewa Yogyakarta. Hal ini dapat disimpulkan semakin tinggi penyerapan tenaga kerja maka kemiskinan di Kabupaten/Kota DIY akan menurun. Lapangan kerja di DIY didominasi oleh pertanian karena kemudahan dalam menyerap tenaga kerja yang tidak memerlukan syarat-syarat tertentu.

## DAFTAR PUSTAKA

- Agustina, E., Syechalad, M. N., & Hamzah, A. (2019). Pengaruh Jumlah Penduduk, Tingkat Pengangguran Dan Tingkat Pendidikan Terhadap Kemiskinan Di Provinsi Aceh. *Jurnal Perspektif Ekonomi Darussalam*, 4(2), 265–283.  
<https://doi.org/10.24815/jped.v4i2.13022>
- Ansori, & Priyono, J. (2018). Analisis Pengaruh Penyerapan Tenaga Kerja Dan Upah Minimum Pekerja Terhadap Jumlah Kemiskinan Di Provinsi Jawa Timur Tahun 2009-2015. *Jurnal Ekonomi & Bisnis*, 3(1), 561.
- Benny, J. (2013). Ekspor Dan Impor Pengaruhnya Terhadap Posisi Cadangan Devisa Di Indonesia. *Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen,*

- Bisnis dan Akuntansi*, 1(4), 1406–1415.
- BPS. (2020). *Statistik Kemiskinan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta 2020* (S. W. Darma & J. Nawawi, Ed.). Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta: Badan Pusat Statistik Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Diambil dari <https://yogyakarta.bps.go.id>
- Didu, S., & Fauzi, F. (2016). Pengaruh Jumlah Penduduk, Pendidikan Dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Kemiskinan Di Kabupaten Lebak. *Jurnal Ekonomi-Qu*, 6(1), 102–117. <https://doi.org/10.35448/jequ.v6i1.4199>
- Fahrika, A. I., Salam, H., & Buhasyim, M. A. (2020). Effect of Human Development Index ( HDI ), Unemployment , and Investment Realization toward Poverty in South Sulawesi- Indonesia. *The International Journal of Social Sciences World TIJOSSW*, 2(02).
- Gujarati, & Porter, D. C. (2013). *Dasar-dasar Ekonometrika* (5 ed.). Jakarta: Salemba Empa.
- Hutagaol, D. T., Tarmizi, H. B., & Daulay, M. (2019). *An Analysis on the Influence of Population Growth Rate , Economic Growth , Human Development Index , Income Distribution , and Unemployment Rate toward Poverty in All Provinces in Indonesia*. 6(January), 100–108.
- Luckynuari, P. A. (2019). Analisis Pengaruh Kemiskinan, Pengangguran Dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Kualitas Pembangunan Manusia (Studi Kasus Kabupaten/Kota Di Provinsi D.I. Yogyakarta). *Diponegoro Journal Of Economics*, 1(1), 80–87.
- Nurkse, R. (1964). *Masalah Pembentukan Modal di Negara-Negara jang Sedang Membangun*. Jakarta: Bhratara.
- Pratiwi, A. W. (2019). Membangun Manusia Gunungkidul yang Berkualitas. Diambil 17 Maret 2021, dari AYOSEMARANG.COM website: <https://ayosemarang.com/read/2019/06/15/39799/membangun-manusia-gunungkidul-yang-berkualitas>
- Purnomo, A. B., & Kusreni, S. (2019). Pengaruh Investasi, PDRB Dan Penyerapan Tenaga Kerja Terhadap Jumlah Penduduk Miskin. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Airlangga*, 29(April), 79–93. <https://doi.org/10.20473/jeba.V29I22019.6213>
- Sabandar, S. (2016). Ekonomi Melambat, Pengangguran di Yogyakarta Meningkat. Diambil 17 Maret 2021, dari Tempo.co website: <https://bisnis.tempo.co/read/744935/ekonomi-melambat-pengangguran-di-yogyakarta-meningkat/full&view=ok>
- Sari, R. L., & Khoirudin, R. (2019). Determinan Tingkat Kemiskinan di Pulau Madura. *Jurnal Manajemen*, 9(2), 2.
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D*. Bandung: Alfabeta.
- Susilowati, D., & Suliswanto, M. S. W. (2015). Pertumbuhan Ekonomi, Indeks Pembangunan Manusia, Utang Luar Negeri Dan Kemiskinan (Kajian Teoritis Di Indonesia). *Journal of Innovation in Business and Economics*, 6(1), 89. <https://doi.org/10.22219/jibe.vol6.no1.89-106>